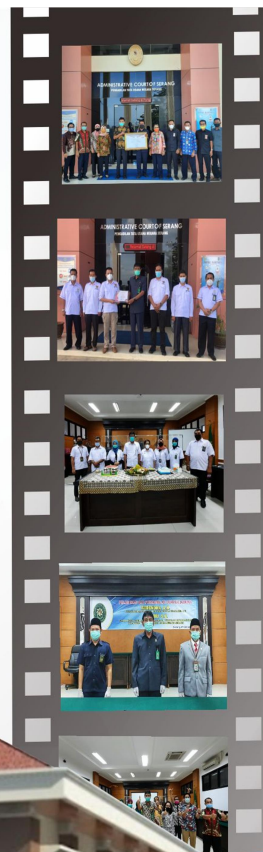


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jl. Syech Nawawi Albantani Km. 5 No. 3 Serang-Banten 42123
Telp: (0254) 214855 Fax: (0254) 214085
Email: serang@ptun.org Website: www.ptun-serang.go.id



KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, yang pada intinya berisi Program Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini diharapkan mampu merepresentasikan wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi birokrasi bersih dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang telah ditetapkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 ini merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu 2020 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sudah ditetapkan yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung"

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna menyempurnakan Laporan Kegiatan di masa yang akan datang.

Serang, 7 Januari 2021
KETUA,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.
NIP. 195708051982031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	1
C. Rencana Strategis	2
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	5
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	5
B. PENYELESAIAN PERKARA	
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	16
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	16
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ..	18
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	18
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	18
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	
1. Pos Bantuan Hukum	18
2. Prodeo	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	21
B. Mutasi	22
C. Promosi	22
D. Pensiun.....	23
E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat	24

BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	31
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	33
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	37
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	41
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42
	C. Inovasi Pelayanan Publik	44
	D. Kegiatan Layanan Lainnya	46
BAB VI	PENGAWASAN	
	A. Internal	49
	B. Evaluasi	51
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	52
	B. Rekomendasi	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	12
Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	14
Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	15
Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020	16
Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2020	17
Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan TUN Serang	21
Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	22
Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	22
Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai PTUN Serang	23
Tabel 3.5. Monitoring Diklat/Bimtek Hakim dan Pegawai PTUN Serang	25
Tabel 4.1. Realisasi Belanja Pegawai	32
Tabel 4.2. Realisasi Belanja Barang Operasional	32
Tabel 4.3. Realisasi Belanja Modal	32
Tabel 4.4. Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan	33
Tabel 4.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung	33
Tabel 4.6. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara	33
Tabel 4.7. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2	34
Tabel 4.8. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4	34
Tabel 4.9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34
Tabel 4.10. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung	35
Tabel 4.11. Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	35
Tabel 4.12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	36
Tabel 4.13. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	36
Tabel 4.14. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi	37
Tabel 4.15. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court	39
Tabel 4.16. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	39
Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2020	44
Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2020	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Server Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	37
Gambar 4.2. E-Court Corner	38
Gambar 4.3. Mesin Informasi E-Court	38
Gambar 4.4. Menu Login SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	40
Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu “A” Excellent	42
Gambar 5.2. Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	43
Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung	43
Gambar 5.4. Sertifikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	47
Gambar 5.5. Sertifikat Badan Publik Menuju Informatif	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama, kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

B. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki Visi dan Misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG YANG AGUNG”

Misi : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 3 misi sebagai fokus program kerjanya:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

C. Rencana Strategis

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Rencana Strategis 2019 – 2023 Mahkamah Agung RI, dan setiap tahun telah dilakukan Reviu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua / Hakim / Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat langkah – langkah strategis sebagai berikut :

1. Merencanakan dan menyusun Program Kerja.
Program Kerja pada dasarnya meliputi tugas pokok dan fungsi.
2. Merencanakan dan menyusun Pembagian Tugas (*Job Description*) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan dan menerbitkan suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing hakim menjadi Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/080/SK/VII/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*.
4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 6 bulan.

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, lembaga lain maupun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sendiri yang dilaksanakan secara rutin melalui rapat pembinaan sebulan sekali dan rapat terbatas sesuai kebutuhan oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris.
6. Melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*blue print*) yang dibuat Mahkamah Agung.
7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dan digitalisasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah mempunyai website menggunakan situs berdomain *go.id* dengan Home Page: *www.ptun-serang.go.id*, Selain sebagai bentuk tindaklanjut pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 03/DjMT/SE/X/2012 tentang Informasi Yang Wajib Ditampilkan pada Website serta Penggunaan Aplikasi SIMPEG serta SIPP PTUN di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan dapat teraplikasi. Sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. W2-TUN7/418/HM.02.3/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Admin TI Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka telah dibentuk tim website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertugas mengelola website guna memberikan pelayanan keterbukaan informasi dan sekaligus membantu kelancaran tugas peradilan dalam melaksanakan Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan.

8. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada masyarakat luas melalui media, Ketua Pengadilan telah menunjuk petugas kehumasan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertugas untuk melakukan kegiatan komunikasi secara sistematis dalam membangun citra positif pengadilan.
9. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
10. Mengadakan inventarisasi jumlah data Pegawai (*bezetting*) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (*bezetting*) dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
11. Menyusun daftar Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap tahun.
12. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas gedung (pengadaan meubelair, kendaraan dinas, AC, alat pengolah data/komputer, meja kerja, meja sidang, kursi kerja, kursi sidang majelis) dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2019 terdapat Sisa 19 (sembilan belas) perkara, pada tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menerima Perkara masuk 73 (tujuh puluh tiga) Perkara, Perkara yang dicabut 16 (enam belas) Perkara, Perkara yang diputus 46 (empat puluh enam) Perkara, Perkara yang didismissal 4 (lima) Perkara, Perkara Perlawanan 1 (satu) Perkara dan Sisa Perkara 25 (dua puluh lima) Perkara.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2019 terdapat sisa 13 (tiga belas) Perkara, pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Perkara masuk 30 (tiga puluh) Perkara, Perkara yang dicabut 2 (dua) Perkara, Perkara yang diputus 29 (dua puluh sembilan) Perkara dan Sisa Perkara 12 (dua belas) Perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2019 terdapat Sisa 9 (sembilan) Perkara, pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Perkara masuk 24 (dua puluh empat) Perkara, Perkara yang dicabut tidak ada, Perkara yang diputus 10 (sepuluh) Perkara, dan Sisa Perkara 23 (dua puluh tiga) Perkara.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2019 terdapat Sisa 3 (tiga) Perkara, pada tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Perkara masuk 5 (lima), Perkara yang dicabut tidak ada, Perkara yang diputus 3 (tiga) Perkara dan Sisa Perkara 5 (lima) Perkara.

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENETAPAN DISMISSAL	ACARA SINGKAT				ACARA BIASA / ACARA CEPAT				SISA AKHIR NOMOR PERKARA		KETERANGAN
					TANGGAL		TANGGAL		TANGGAL PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	TANGGAL			BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	
					PERNERIMAAN PERLAWANAN	PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN PERLAWANAN		PEMERIKSAAN PERSIAPAN	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1/G/2020/PTUN.SRG	Lelang	07/01/2020	-	-	-	-	-	07/01/2020	08/01/2020	29/01/2020	22/04/2020	-	-	Ditolak
2	2/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	14/01/2020						15/01/2020	27/01/2020	19/02/2020	19/04/2020			Dicabut
3	3/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	14/01/2020	-	-	-	-	-	15/01/2020	28/01/2020	18/02/2020	10/03/2020	-	-	Dicabut
4	4/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	16/01/2020	-	-	-	-	-	17/01/2020	20/01/2020	27/02/2020	14/05/2020	-	-	Ditolak
5	5/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	23/01/2020	-	-	-	-	-	24/01/2020	27/01/2020	19/02/2020	06/05/2020	-	-	Dikabulkan
6	6/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	24/01/2020	-	-	-	-	-	24/01/2020	03/02/2020	11/03/2020	03/06/2020	-	-	Tidak Diterima
7	7/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	27/01/2020	-	-	-	-	-	03/02/2020	12/02/2020	-	11/03/2020			Dicabut
8	8/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	13/02/2020	-	-	-	-	-	14/02/2020	17/02/2020	26/03/2020	17/06/2020	-	-	Dikabulkan
9	9/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	28/02/2020	-	-	-	-	-	02/03/2020	02/03/2020	21/04/2020	05/08/2020	-	-	Tidak Diterima

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

10	10/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	02/03/2020	-	-	-	-	-	04/03/2020	05/03/2020	08/04/2020	15/07/2020	-	-	Tidak Diterima
11	11/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	10/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	31/03/2020	-	-	Dicabut
12	12/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	10/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	31/03/2020	-	-	Dicabut
13	13/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	10/03/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	31/03/2020	-	-	Dicabut
14	14/G/TF/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	17/03/2020	-	-	-	-	-	18/03/2020	01/04/2020	18/05/2020	22/09/2020	-	-	Tidak Diterima
15	15/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	17/03/2020	-	-	-	-	-	19/03/2020	01/04/2020	06/05/2020	06/08/2020	-	-	Ditolak
16	16/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	19/03/2020	-	-	-	-	-	24/03/2020	15/04/2020	20/05/2020	18/08/2020	-	-	Tidak Diterima
17	17/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	19/03/2020	14/04/2020	27/04/2020	04/05/2020	20/05/2020	16/06/2020	-	-	-	-	-	-	Dismissal
18	18/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	01/04/2020	-	-	-	-	-	07/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	05/08/2020	-	-	Tidak Diterima
19	19/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	01/04/2020	-	-	-	-	-	07/04/2020	16/04/2020	12/05/2020	06/08/2020	-	-	Tidak Diterima
20	20/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	16/04/2020	19/05/2020								19/05/2020			Dismissal
21	21/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	21/04/2020	-	-	-	-	-	30/04/2020	19/05/2020	24/06/2020	16/09/2020	-	-	Dicabut
22	22/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	21/04/2020	-	-	-	-	-	30/04/2020	19/05/2020	24/06/2020	16/09/2020	-	-	Dicabut
23	23/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	21/04/2020	-	-	-	-	-	30/04/2020	19/05/2020	-	10/06/2020	-	-	Dicabut
24	24/G/2020/PTUN.SRG	Perijinan	23/04/2020	-	-	-	-	-	04/05/2020	20/05/2020	17/06/2020	16/09/2020	-	-	Tidak Diterima

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

25	25/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	30/04/2020	28/05/2020								28/05/2020			Dismissal
26	26/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	06/05/2020	-	-	-	-	-	11/05/2020	20/05/2020	01/07/2020	06/10/2020	-	-	Tidak Diterima
27	27/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	11/05/2020	-	-	-	-	-	13/05/2020	28/05/2020	24/06/2020	09/09/2020	-	-	Tidak Diterima
28	28/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	18/05/2020	-	-	-	-	-	19/05/2020	03/06/2020	02/07/2020	15/10/2020	-	-	Dikabulkan
29	29/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	03/06/2020	-	-	-	-	-	03/06/2020	16/06/2020	30/06/2020	22/09/2020	-	-	Tidak Diterima
30	30/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	03/06/2020	-	-	-	-	-	03/06/2020	16/06/2020	30/06/2020	22/09/2020	-	-	Tidak Diterima
31	31/G/2020/PTUN.SRG	Perijinan	15/06/2020	-					-	-	-	30/06/2020	-	-	Dicabut
32	32/G/LH/2020/PTUN.SRG	Lingkungan Hidup	24/06/2020	-	-	-	-	-	25/06/2020	07/07/2020	04/08/2020	06/10/2020	-	-	Dicabut
33	33/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	30/06/2020	-	-	-	-	-	01/07/2020	15/07/2020	06/08/2020	17/12/2020	-	-	Tidak Diterima
34	34/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	03/07/2020	23/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	23/07/2020	-	-	Dismissal
35	35/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	06/07/2020	-	-	-	-	-	07/07/2020	14/07/2020	28/07/2020	15/09/2020	-	-	Tidak Diterima
36	36/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	06/07/2020	-	-	-	-	-	07/07/2020	15/07/2020	25/08/2020	-	-	√	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

37	37/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	13/07/2020	-	-	-	-	-	14/07/2020	21/07/2020	03/09/2020	22/12/2020	-	-	Tidak Diterima
38	38/G/2020/PTUN.SRG	Perijinan	14/07/2020	-	-	-	-	-	14/07/2020	22/07/2020	19/08/2020	25/11/2020	-	-	Dikabulkan
39	39/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	22/07/2020	-	-	-	-	-	23/07/2020	04/08/2020	26/08/2020	19/11/2020	-	-	Tidak Diterima
40	40/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	12/08/2020	-	-	-	-	-	13/08/2020	26/08/2020	16/09/2020	-	-	√	
41	41/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	19/08/2020	-	-	-	-	-	24/08/2020	02/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	-	-	Dicabut
42	42/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	24/08/2020	-	-	-	-	-	24/08/2020	02/09/2020	09/09/2020	02/12/2020	-	-	Tidak Diterima
43	43/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	24/08/2020	-	-	-	-	-	25/08/2020	01/09/2020	30/09/2020	23/12/2020	-	-	Dikabulkan
44	1/P/FP/2020/PTUN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	26/08/2020	-	-	-	-	-	27/08/2020	-	03/09/2020	24/09/2020	-	-	Tidak Diterima
45	44/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	31/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	24/09/2020	-	-	Dicabut
46	45/G/2020/PTUN.SRG	Lain-lain	16/09/2020	-	-	-	-	-	24/09/2020	06/10/2020	10/11/2020	-	-	√	
47	46/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/09/2020	-	-	-	-	-	16/09/2020	24/09/2020	14/10/2020	-	-	√	
48	47/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	05/10/2020	-	-	-	-	-	14/10/2020	22/10/2020	24/11/2020	-	-	√	
49	48/G/2020/PTUN.SRG	Tender	15/10/2020	-	-	-	-	-	15/10/2020	27/10/2020	24/11/2020	17/12/2020	-	-	Dikabulkan
50	49/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	15/10/2020	-	-	-	-	-	19/10/2020	03/11/2020	01/12/2020	-	-	√	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

51	50/G/KI/2020/PTUN.SRG	KIP	15/10/2020	-	-	-	-	-	04/12/2020	-	-	-	-	√	
52	51/G/LH/2020/PTUN.SRG	Lingkungan Hidup	15/10/2020	-	-	-	-	-	19/10/2020	04/11/2020	02/12/2020	-	-	√	
53	52/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	22/10/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	09/11/2020	-	-	Dicabut
54	53/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	23/10/2020	-	-	-	-	-	26/10/2020	05/11/2020	19/11/2020	-	-	√	
55	2/P/FP/2020/PTUN.SRG	Permohonan / Fiktif Positif	27/10/2020	-	-	-	-	-	27/10/2020	-	05/11/2020	26/11/2020	-	-	Ditolak
56	54/G/2020/PTUN.SRG	Lelang	02/11/2020	26/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	26/11/2020	-	-	Dismissal
57	55/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	18/11/2020	-	-	-	-	-	19/11/2020	03/12/2020	-	-	-	√	
58	56/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	23/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	16/12/2020	-	-	Dicabut
59	57/G/2020/PTUN.SRG	Kepegawaian	24/11/2020	-	-	-	-	-	25/11/2020	03/12/2020	23/12/2020	-	-	√	
60	58/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	25/11/2020	-	-	-	-	-	25/11/2020	08/12/2020	-	-	-	√	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

61	59/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	27/11/2020	-	-	-	-	-	01/12/2020	15/12/2020	-	-	-	√	
62	60/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	27/11/2020	-	-	-	-	-	01/12/2020	15/12/2020	-	-	-	√	
63	61/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	27/11/2020	-	-	-	-	-	01/12/2020	15/12/2020	-	-	-	√	
64	62/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	27/11/2020	-	-	-	-	-	01/12/2020	15/12/2020	-	-	-	√	
65	63/G/KI/2020/PTUN.SRG	KIP	01/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	
66	64/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	17/12/2020	-	-	-	-	√	
67	65/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	18/12/2020	-	-	-	-	√	
68	66/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	18/12/2020	-	-	-	-	√	
69	67/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	18/12/2020	-	-	-	-	√	
70	68/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	18/12/2020	-	-	-	-	√	
71	69/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	18/12/2020	-	-	-	-	√	
72	70/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	21/12/2020	-	-	-	-	√	
73	71/G/2020/PTUN.SRG	Pertanahan	16/12/2020	-	-	-	-	-	18/12/2020	-	-	-	-	√	

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL			NO. PERKARA BANDING	KETERANGAN
		PUTUSAN PTUN	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	4	5	6	7	8
1	43/G/2019/PTUN.SRG	16 - 12 - 2019	29 - 01- 2020	27 - 03 - 2020	109/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 18-06-2020
2	54/G/2019/PTUN.SRG	18 - 02 - 2020	27 - 02 - 2020	27 - 04 - 2020	135/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 15-06-2020
3	57/G/2019/PTUN.SRG	18 - 02 - 2020	27 - 02 - 2020	-	-	Dicabut tanggal 13 Maret 2020
4	52/G/2019/PTUN.SRG	5 - 03 - 2020	11 - 03 - 2020	08 - 05 - 2020	145/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 06-07-2020
5	53/G/2019/PTUN.SRG	10 - 03 - 2020	12 - 03 - 2020	11 - 05 - 2020	162/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 25-06-2020
6	67/G/2019/PTUN.SRG	15 - 04 - 2020	30 - 04 - 2020	29 - 06 - 2020	193/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding 25-08-2020
7	69/G/2019/PTUN.SRG	29 - 04 - 2020	04 - 05 - 2020	01 - 07 - 2020	194/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan tgl 17-09-2020
8	1/G/2020/PTUN.SRG	22 - 04 - 2020	04 - 05 - 2020	01 - 07 - 2020	195/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding 25-08-2020
9	5/G/2020/PTUN.SRG	06 - 05 - 2020	14 - 05 - 2020	10 - 07 - 2020	206/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding 30-09-2020
10	60/G/2019/PTUN.SRG	05 - 05 - 2020	19 - 05 - 2020	17 - 07 - 2020	212/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan tgl 23-09-2020
11	61/G/2019/PTUN.SRG	05 - 05 - 2020	19 - 05 - 2020	17 - 07 - 2020	213/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 3-11-2020
12	58/G/2019/PTUN.SRG	14 - 05 - 2020	19 - 05 - 2020	17 - 07 - 2020	211/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-11-2020
13	4/G/2020/PTUN.SRG	14 - 05 - 2020	20 - 05 - 2020	17 - 07 - 2020	214/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding 28-08-2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

14	66/G/2019/PTUN.SRG	20 - 05 - 2020	26 - 05 - 2020	24 - 07 - 2020	216/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan tgl 23-09-2020
15	6/G/2020/PTUN.SRG	03 - 06 - 2020	16 - 06 - 2020	13 - 08 - 2020	233/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 17-11-2020
16	8/G/2020/PTUN.SRG	17 - 06 - 2020	29 - 06 - 2020	27 - 08 - 2020	239/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 6-11-2020
17	10/G/2020/PTUN.SRG	15 - 07 - 2020	23 - 07 - 2020	21 - 09 - 2020	258/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 17-11-2020
18	9/G/2020/PTUN.SRG	05 - 08 - 2020	06 - 08 - 2020	05 - 10 - 2020	265/B/2020/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 24-11-2020
19	18/G/2020/PTUN.SRG	05 - 08 - 2020	13 - 08 - 2020	12 - 10 - 2020	278/B/2020/PT.TUN.JKT	-
20	16/G/2020/PTUN.SRG	18 - 08 - 2020	31 - 08 - 2020	27 - 10 - 2020	288/B/2020/PT.TUN.JKT	-
21	27/G/2020/PTUN.SRG	09 - 09 - 2020	17 - 09 - 2020	16 - 11 - 2020	314/B/2020/PT.TUN.JKT	-
22	24/G/2020/PTUN.SRG	16 - 09 - 2020	30 - 09 - 2020	27 - 11 - 2020	320/B/2020/PT.TUN.JKT	-
23	30/G/2020/PTUN.SRG	22 - 09 - 2020	05 - 10 - 2020	04 - 12 - 2020	328/B/2020/PT.TUN.JKT	-
24	14/G/TF/2020/PTUN.SRG	22 - 09 - 2020	05 - 10 - 2020	04 - 12 - 2020	326/B/2020/PT.TUN.JKT	-
25	29/G/2020/PTUN.SRG	22 - 09 - 2020	06 - 10 - 2020	04 - 12 - 2020	327/B/2020/PT.TUN.JKT	-
26	26/G/2020/PTUN.SRG	06 - 10 - 2020	13 - 10 - 2020	11 - 12 - 2020	339/B/2020/PT.TUN.JKT	-
27	28/G/2020/PTUN.SRG	15 - 10 - 2020	26 - 10 - 2020	28 - 12 - 2020	-	-
28	38/G/2020/PTUN.SRG	25 - 11 - 2020	15 - 12 - 2020	-	-	-
29	33/G/2020/PTUN.SRG	17 - 12 - 2020	29 - 12 - 2020	-	-	-

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO.	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA KASASI	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS PT TUN OLEH PTUN	PUTUSAN PT TUN	PEMBERITAHUAN PUTUSAN PT TUN	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	56/G/PU/2019/PTUN.SRG	-	-	-	06 - 01 - 2020	22 - 01 - 2020	148 K/TUN/2020	Pemberitahuan Putusan tgl 15-07-2020
2	22/G/2019/PTUN.SRG	17 - 02 - 2020	11 - 02 - 2020	18 - 02 - 2020	27 - 02 - 2020	23 - 03 - 2020	-	-
3	36/G/2019/PTUN.SRG	18 - 03 - 2020	11 - 03 - 2020	19 - 03 - 2020	30 - 03 - 2020	28 - 05 - 2020	-	-
4	65/G/KI/2019/PTUN.SRG	-	-	-	17 - 04 - 2020	19 - 05 - 2020	-	-
5	39/G/2019/PTUN.SRG	19 - 05 - 2020	08 - 05 - 2020	26 - 05 - 2020	03 - 06 - 2020	06 - 07 - 2020	-	-
6	35/G/2019/PTUN.SRG	26 - 05 - 2020	12 - 05 - 2020	27 - 05 - 2020	05 - 06 - 2020	13 - 07 - 2020	-	-
7	34/G/2019/PTUN.SRG	19 - 05 - 2020	14 - 05 - 2020	27 - 05 - 2020	05 - 06 - 2020	06 - 07 - 2020	-	-
8	33/G/2019/PTUN.SRG	05 - 05 - 2020	22 - 04 - 2020	20 - 05 - 2020	05 - 06 - 2020	03 - 08 - 2020	-	-
9	46/G/2019/PTUN.SRG	19 - 05 - 2020	13 - 05 - 2020	26 - 05 - 2020	08 - 06 - 2020	09 - 07 - 2020	-	-
10	54/G/2019/PTUN.SRG	12 - 06 - 2020	09 - 06 - 2020	15 - 06 - 2020	26 - 06 - 2020	03 - 08 - 2020	-	-
11	53/G/2019/PTUN.SRG	24 - 06 - 2020	19 - 06 - 2020	25 - 06 - 2020	02 - 07 - 2020	27 - 07 - 2020	-	-
12	52/G/2019/PTUN.SRG	03 - 07 - 2020	29 - 06 - 2020	06 - 07 - 2020	16 - 07 - 2020	11 - 09 - 2020	-	-
13	1/G/2020/PTUN.SRG	25 - 08 - 2020	13 - 08 - 2020	25 - 08 - 2020	04 - 09 - 2020	02 - 11 - 2020	-	-
14	67/G/2019/PTUN.SRG	25 - 08 - 2020	14 - 08 - 2020	25 - 08 - 2020	07 - 09 - 2020	22 - 10 - 2020	-	-
15	4/G/2020/PTUN.SRG	27 - 08 - 2020	24 - 08 - 2020	28 - 08 - 2020	09 - 09 - 2020	02 - 11 - 2020	-	-

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

16	69/G/2019/PTUN.SRG	16 - 09 - 2020	10 - 09 - 2020	17 - 09 - 2020	28 - 09 - 2020	12 - 11 - 2020	-	-
17	66/G/2019/PTUN.SRG	22 - 09 - 2020	16 - 09 - 2020	23 - 09 - 2020	29 - 09 - 2020	10 - 11 - 2020	-	-
18	5/G/2020/PTUN.SRG	30 - 09 - 2020	01 - 09 - 2020	30 - 09 - 2020	13 - 10 - 2020	15 - 12 - 2020	-	-
19	61/G/2019/PTUN.SRG	02 - 11 - 2020	20 - 10 - 2020	03 - 11 - 2020	10 - 11 - 2020	-	-	-
20	58/G/2019/PTUN.SRG	04 - 11 - 2020	26 - 10 - 2020	06 - 11 - 2020	16 - 11 - 2020	-	-	-
21	6/G/2020/PTUN.SRG	16 - 11 - 2020	02 - 11 - 2020	17 - 11 - 2020	23 - 11 - 2020	28 - 12 - 2020	-	-
22	60/G/2019/PTUN.SRG	22 - 09 - 2020	15 - 09 - 2020	23 - 09 - 2020	25 - 11 - 2020	-	-	-
23	10/G/2020/PTUN.SRG	16 - 11 - 2020	10 - 11 - 2020	17 - 11 - 2020	26 - 11 - 2020	-	-	-
24	9/G/2020/PTUN.SRG	23 - 11 - 2020	13 - 11 - 2020	24 - 11 - 2020	04 - 12 - 2020	-	-	-

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA PK	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS MA-RI	PUTUSAN KASASI	PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS PK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17/G/2018/PTUN.SRG	01 - 11 - 2019	26 - 09 - 2019	04 - 11 - 2019	07 - 04 - 2020	18 - 05 - 2020	-	-
2	32/G/2018/PTUN.SRG	26 - 02 - 2020	02 - 12 - 2019	27 - 02 - 2020	24 - 08 - 2020	23 - 11 - 2020	-	-
3	31/G/2018/PTUN.SRG	10 - 06 - 2020	27 - 02 - 2020	11 - 06 - 2020	24 - 08 - 2020	10 - 12 - 2020	-	-
4	25/G/2018/PTUN.SRG	10 - 07 - 2020	05 - 07 - 2020	10 - 07 - 2020	03 - 11 - 2020	21 - 12 - 2020	-	Upaya Banding langsung PK
5	46/G/2017/PTUN.SRG	13 - 05 - 2020	12 - 03 - 2020	16 - 05 - 2020	13 - 11 - 2020	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 masih terdapat 25 (dua puluh lima) Perkara Sisa, dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara
1	2	3
A	GUGATAN	
1	Pertanahan	39
2	Kepegawaian	4
3	Perijinan	3
4	Lingkungan Hidup	3
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	1
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Penggantian Antar Waktu	-
11	Ketenagakerjaan	-
12	Sengketa Informasi Publik (KIP)	1
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	2
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-
17	Merek	-
18	Lain-lain	14
JUMLAH		67

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 terdapat Perkara yang Putus Kurang dari 3 (tiga) Bulan sejumlah 23 (dua puluh tiga) Perkara, Perkara yang putus 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Bulan sejumlah 33 (tiga

puluh tiga) Perkara, dan Perkara putus 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) Bulan sejumlah 11 (sebelas perkara) Perkara dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Perkara.

Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2020

No	PERKARA PUTUS TAHUN 2020		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 – 5 BULAN	5 – 12 BULAN
1	2	3	4
1	-	41/G/2019/PTUN.SRG	-
2	-	43/G/2019/PTUN.SRG	-
3	-	45/G/2019/PTUN.SRG	-
4	-	50/G/2019/PTUN.SRG	-
5	-	-	51/G/2019/PTUN.SRG
6	-	52/G/2019/PTUN.SRG	-
7	-	53/G/2019/PTUN.SRG	-
8	-	54/G/2019/PTUN.SRG	-
9	-	55/G/2019/PTUN.SRG	-
10	-	57/G/2019/PTUN.SRG	-
11	-	-	58/G/2019/PTUN.SRG
12	-	-	60/G/2019/PTUN.SRG
13	-	-	61/G/2019/PTUN.SRG
14	64/G/2019/PTUN.SRG	-	-
15	65/G/KI/2019/PTUN.SRG	-	-
16	-	-	66/G/2019/PTUN.SRG
17	-	67/G/2019/PTUN.SRG	-
18	-	-	68/G/TF/2019/PTUN.SRG
19	-	69/G/2019/PTUN.SRG	-
20	-	1/G/2020/PTUN.SRG	-
21	2/G/2020/PTUN.SRG	-	-
22	3/G/2020/PTUN.SRG	-	-
23	-	4/G/2020/PTUN.SRG	-
24	-	5/G/2020/PTUN.SRG	-
25	-	6/G/2020/PTUN.SRG	-
26	7/G/2020/PTUN.SRG	-	-
27	-	8/G/2020/PTUN.SRG	-
28	-	-	9/G/2020/PTUN.SRG
29	-	10/G/2020/PTUN.SRG	-
30	11/G/2020/PTUN.SRG	-	-
31	12/G/2020/PTUN.SRG	-	-
32	13/G/2020/PTUN.SRG	-	-
33	-	-	14/G/TF/2020/PTUN.SRG
34	-	15/G/2020/PTUN.SRG	-
35	-	16/G/2020/PTUN.SRG	-
36	17/G/2020/PTUN.SRG	-	-
37	-	18/G/2020/PTUN.SRG	-
38	-	19/G/2020/PTUN.SRG	-
39	20/G/2020/PTUN.SRG	-	-

40	-	21/G/2020/PTUN.SRG	-
41	-	22/G/2020/PTUN.SRG	-
42	23/G/2020/PTUN.SRG	-	-
43	-	24/G/2020/PTUN.SRG	-
44	25/G/2020/PTUN.SRG	-	-
45	-	-	26/G/2020/PTUN.SRG
46	-	27/G/2020/PTUN.SRG	-
47	-	28/G/2020/PTUN.SRG	-
48	-	29/G/2020/PTUN.SRG	-
49	-	30/G/2020/PTUN.SRG	-
50	31/G/2020/PTUN.SRG	-	-
51	-	32/G/LH/2020/PTUN.SRG	-
52	-	-	33/G/2020/PTUN.SRG
53	34/G/2020/PTUN.SRG	-	-
54	35/G/2020/PTUN.SRG	-	-
55	-	-	37/G/2020/PTUN.SRG
56	-	38/G/2020/PTUN.SRG	-
57	-	39/G/2020/PTUN.SRG	-
58	41/G/2020/PTUN.SRG	-	-
59	-	42/G/2020/PTUN.SRG	-
60	-	43/G/2020/PTUN.SRG	-
61	1/P/FP/2020/PTUN.SRG	-	-
62	44/G/2020/PTUN.SRG	-	-
63	48/G/2020/PTUN.SRG	-	-
64	52/G/2020/PTUN.SRG	-	-
65	2/P/FP/2020/PTUN.SRG	-	-
66	54/G/2020/PTUN.SRG	-	-
67	56/G/2020/PTUN.SRG	-	-
JML	23 Perkara	33 Perkara	11 Perkara

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 36 (tiga puluh enam) perkara
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5 (lima) perkara
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 44 (empat puluh empat) perkara

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi

dan *advice* hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka pemertaaan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Dalam tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah merealisasikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dengan jumla layanan 288 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp31.800.000,- yang seluruhnya dibiayai dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-05) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Prodeo

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga setiap orang yang tidak mampu secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk tahun anggaran 2020 melalui DIPA-05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengalokasikan anggaran pembebasan biaya panjar perkara prodeo sebesar Rp450.000,-

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat cakup, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi, Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial, Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yudisial dan Tenaga Honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial menangani administrasi bagian Keperkaraan sedangkan Sumber Daya Manusia Bidang Non Teknis Yudisial menangani administrasi umum Kesekretariatan.

Adapun komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III				GOL. II				GOL. I				PENDIDIKAN							
			LK	PR	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	S.3	S.2	S.1	D.3	SLA	SMP	SD	
I	HAKIM																												
	1. Ketua	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Wakil Ketua	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Hakim	11	6	5	2	1	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	KEPANITERAAN																												
	1. Panitera	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. Panitera Muda	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Panitera Pengganti	5	2	3	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4. Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5. Juru Sita Pengganti	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Calon Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III	KESEKRETARIATAN																												
	1. Sekretaris	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Staff	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV	PEGAWAI PEMERINTAN NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	4	-	-		
	J U M L A H	42	26	16	2	3	-	1	1	2	5	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	4	-	-		

B. Mutasi

Rekapitulasi mutasi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020 :

Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	1	-	
	2. Wakil Ketua	-	-	
	3. Hakim	4	8	
	4. Calon Hakim	-	1	
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	1	-	
	2. Panitera Muda	1	1	
	3. Panitera Pengganti	1	1	
	4. Juru Sita	-	-	
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	
	6. Calon Juru Sita	-	-	
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	1	-	
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	1	-	
	5. Staf	-	-	
	JUMLAH	10	19	

C. Promosi

Rekapitulasi promosi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	HAKIM		
	1. Ketua	-	-
	2. Wakil Ketua	-	-
	3. Hakim	2	Diangkat menjadi Wakil Ketua pada PTUN Kupang dan Wakil Ketua pada PTUN Pontianak
	4. Calon Hakim	-	-

II.	KEPANITERAAN		
	1. Panitera	-	-
	2. Panitera Muda	-	-
	3. Panitera Pengganti	1	Diangkat menjadi Panitera Pengganti pada PTTUN Jakarta
	4. Juru Sita	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-
III.	KESEKRETARIATAN		
	1. Sekretaris	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-
5. Staf	1	Diangkat menjadi Juru Sita Pengganti pada PTUN Serang	
JUMLAH		4	

D. Pensiun

Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	TMT PENSIUN	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	1	1 Februari 2020	BUP (65 Tahun)
	2. Wakil Ketua	-	-	-
	3. Hakim	-	-	-
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	1	1 Maret 2020	BUP (60Tahun)
	2. Panitera Muda	-	-	-
	3. Panitera Pengganti	-	-	-
	4. Juru Sita	-	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	-
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	-	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	-
5. Staf	-	-	-	-
JUMLAH		2		

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial serta dalam rangka melakukan Pembinaan, Pengelolaan terhadap Sumber Daya Manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf potensial untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

Daftar Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Monitoring Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis Hakim dan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Nama Peserta	Jabatan	Tanggal Kegiatan
1	Pelatihan/Workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bekerja sama dengan Jimly School Law and Government Konrad Adenaur Stiftung (KAS)	Andry Asani, SH.,MH.	Hakim	28 s.d. 30 Januari 2020
2	Penyelenggaraan Bimtek Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Salinan Putusan / Penetapan Elektronik bagi Para Panitera dan Admin e-Court di Lingkungan Peradilan TUN TA. 2020	1. Suwarna, SH.,MH.	Panitera	17 s.d. 19 Februari 2020
		2. Dhonni Adhita Saputra, SH.	Panitera Muda Perkara	
3	Pelatihan Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Tahun 2020 dilanjut dengan pelatihan <i>English Effective Presentation</i> .	Taufik Rahman, S.Sos.,MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan / Pejabat Pembuat Komitmen	16 s.d. 27 Februari 2020
4	Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i> Tahun 2020 di Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI	M. Ferry Irawan , SH.,MH.	Hakim	9 s.d. 22 Maret 2020
5	Bimbingan Teknis Keuangan Perkara bagi Para Panitera Muda Perkara dan Bendahara Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020	Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	18 s.d. 20 Maret 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

6	Pelatihan <i>Change Leadership</i> Secara <i>Online</i> Tahun 2020	Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	30 Maret - 24 April 2020
7	Program <i>Digital Learning</i> Manajemen Keuangan Negara	1. Taufik Rahman, S.Sos.,MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan / Pejabat Pembuat Komitmen	29 Juni s.d. 28 Agustus 2020
		2. Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti / PPABP	
8	Pelatihan <i>High Performance Leadership</i> Secara <i>Online</i> Tahun 2020	Sufi Aryani, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	6 April s.d. 1 Mei 2020
9	Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara	1. Sufi Aryani, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana/ Bendahara Pengeluaran Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/ Bendahara Penerimaan	6 Juli s.d. 4 September 2020
		2. Perina Nur Assyifa, S.I.P		
		3. Jimmy Fernando D. Sianturi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/ Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	
10	Pelatihan <i>Online English Effective Presentation</i> Gelombang I Tahun 2020	Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	4 s.d. 10 Mei 2020
11	Pelatihan <i>Online</i> Metodologi Penelitian	Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	15 s.d. 27 Juni 2020
12	Pelatihan <i>Online Risk Management for Public Sector</i> (Manajemen Risiko)	1. Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panitera Muda Perkara	22 s.d. 26 Juni 2020
		2. Ari Hendrawan, S.H.	Panitera Pengganti	
		3. Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	
13	Pelatihan <i>Online</i> Test Potensi Akademik Tahun 2020	Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	22 s.d. 26 Juni 2020
14	Pelatihan <i>Online</i> Risk Management for Public Sector (Manajemen Risiko)	1. Elvina R. Tampubolon, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	29 Juni s.d. 3 Juli 2020
		2. Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

15	Webinar Menulis Laporan Efektif dari Tempat Tugas	1. Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panitera Muda Perkara	13 s.d. 14 Juli 2020
		2. Sufi Aryani, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
16	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (OOD)	Elizabeth IEHL Tobing, S.H.,M.Hum.	Hakim	17 Juli s.d. 13 Agustus 2020
17	Pelatihan <i>Online</i> Sertifikasi <i>Business Management</i> Modul : <i>Human Resource Management</i> dalam Bahasa Inggris	Taufik Rahman, S.Sos.,MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	29 Juli s.d. 21 Oktober 2020
18	Pelatihan <i>Online</i> Sertifikasi <i>Business Management</i> dalam Bahasa Inggris	Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	29 Juli s.d. 7 Oktober 2020
19	Pelatihan <i>Online Motivation Letter</i>	Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	10 s.d. 14 Agustus 2020
20	Pelatihan Online Risk Management for Public Sector (Manajemen Risiko) <i>Batch</i> 8A s.d. 8C	1. Taufik Rahman, S.Sos.,MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	10 s.d. 14 Agustus 2020
		2. Sufi Aryani, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
21	Pelatihan <i>Online</i> Menulis Laporan Efektif	Dhonni Adhita Saputra, SH.	Panitera Muda Perkara	24 s.d. 28 Agustus 2020
22	Bimbingan Teknis Petunjuk Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2021	1. Nurhasanah, S.H.	Sekretaris	24 Agustus 2020
		2. Sopiah, S.H.	Panitera Pengganti	
		3. Taufik Rahman, S.Sos.,M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
		4. Agung Permadi, S.H.	PPNPN	
23	Pelatihan <i>Online</i> Kepemimpinan Pengawas Gelombang III	Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	31 Agustus s.d. 4 Desember 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

24	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.	Hakim	31 Agustus s.d. 11 September 2020
25	Pelatihan <i>Online Basic Motion Graphic with Adobe After Effect</i> Kelas 01	Hambali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	31 Agustus s.d. 4 September 2020
26	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Secara Elektronik (E-Court) dan Penyusunan Bundel A dan Bundel B di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	1. Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panitera Muda Perkara	2 s.d. 4 September 2020
		2. Ari Hendrawan, S.H.	Panitera Pengganti	
27	Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (E-Court) bagi para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Ditjen Badilmiltun Tahun 2020	1. Yustika Hardwiandita, S.H.	Hakim	11 s.d. 17 September 2020
		2. Febrina Permadi, S.H.	Hakim	
28	Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Bagi Para Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020	1. Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panitera Muda Perkara	18 s.d. 23 September 2020
		2. Ari Hendrawan, S.H.	Panitera Pengganti	
		3. Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	
29	Pelatihan Online Basic Booklet Design with Adobe In Design Kelas 01	Jimmy Fernando Dapot Sianturi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/ Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	21 s.d. 25 September 2020
30	Pelatihan Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Permohonan Fiktif Positif Gelombang 2	1. M. Ikbar Andi Endang, S.H.,M.H.	Hakim	25 September s.d. 12 Oktober 2020
		2. Retno Ariyani, S.H.	Hakim	
		3. Yustika Hardwiandita, S.H.	Hakim	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

31	Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	25 September s.d. 9 Oktober 2020
32	Program E-Learning Bendahara	Perina Nur Assyifa, S.IP.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/ Bendahara Penerimaan	21 s.d. 24 September 2020
33	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Perizinan yang Diterbitkan Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020	1. H. Eri Elfi Ritonga, S.H.,M.H.	Hakim	6 s.d. 8 Oktober 2020
		2. Lucya Permata Sari, S.H.,M.Hum.	Hakim	
34	Webinar Bekerja Dengan Media (Siaran Pers) dari tempat tugas	Suhendra, S.H.	Panitera	5 s.d. 6 Oktober 2020
35	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan III	Perina Nur Assyifa, S.IP.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	9 Oktober s.d. 9 November 2020
36	Pelatihan Online Bekerja dengan Media (Siaran Pers) Batch 2 dari tempat tugas	Yustika Hardwiandita, S.H.	Hakim	13 s.d. 16 Oktober 2020
37	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Jimmy Riyant Natareza, S.H.,M.H.	Hakim	20 s.d. 22 Oktober 2020
38	Pelatihan Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Permohonan Fiktif Positif Gelombang 3	1. H. Eri Elfi Ritonga, S.H.,M.H.	Hakim	16 Oktober s.d. 5 November 2020
		2. Febrina Permadi, S.H.	Hakim	
39	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020	Anna Leonora Tewernussa, S.H.,M.H.	Hakim	3 s.d. 5 November 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2020

40	Bimbingan Teknis Keuangan Perkara bagi Para Panitera Muda Perkara dan Bendahara Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020	1. Dhonni Adhita Saputra, S.H.	Panitera Muda Perkara	3 s.d. 5 November 2020
		2. Dian Kuspriyatno, S.H.	Juru Sita Pengganti	
41	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Ari Hendrawan, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	6 s.d. 25 November 2020
42	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara TA 2020	1. Herry Wibawa, S.H.M.H.	Hakim/ Ketua	10 s.d. 12 November 2020
		2. Suhendra, S.H.	Panitera	
43	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai dan Sosialisasi WBK dan WBBM Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	1. Nurhasanah, S.H.	Sekretaris	18 s.d. 20 November 2020
		2. Suhendra, S.H.	Panitera	
		3. Taufik Rahman, S.Sos.,M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
		4. Hambali, S.H.	Panitera Pengganti	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, yaitu:

1. Nomor DIPA-005.01.2.689313/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan 2 (dua) Program Kegiatan yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.100.182.000,- (Delapan Milyar Seratus Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
2. Nomor DIPA-005.05.2.690202/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan 1 (satu) Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.750.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah keseluruhan alokasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020 adalah Rp8.135.930.000,- (Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dari pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 7.625.530.195,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan serapan sebesar 93,73 %

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.01.2.689313/2020 Tanggal 12 November 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2020.

a) Belanja Pegawai

Tabel 4.1. Realisasi Belanja Pegawai

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Pegawai	5.991.067.000,-	5.628.038.383,-	363.028.617,-	93,94%

b) Belanja Barang Operasional

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Barang Operasional

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang	2.084.115.000,-	1,959,924,072,-	124,190,928,-	94,04%

c) Belanja Modal

Untuk program Sarana dan Prasarana Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat alokasi dana sebesar Rp25.000.000,- berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa personal computer (PC) untuk menunjang kegiatan kepaniteraaran.

Tabel 4.3. Realisasi Belanja Modal

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-	100%

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.05.2.690202/2020 Tanggal 12 November 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2020.

Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat alokasi dana sebesar Rp35.750.000,- dengan capaian penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang Ops. Kepaniteraan	35.750.000,-	28.920.000,-	6.830.000,-	80,90%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.

1) Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung

No.	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PTUN Serang	4.242 m ²	1.572 m ²	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

2) Rumah Negara

Tabel 4.6. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara

No.	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PTUN Serang		N I H I L			

3) Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.7. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Honda	E1F02N 12M2 A/T	1 Unit	Baik
2	Honda	GL PRO III	1 Unit	Rusak Ringan

4) Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.8. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Toyota	New Avanza Veloz 1.5 M/T	1 Unit	Baik
2	Toyota	Corolla Altis 1.8J M/T	1 Unit	Baik
3	Toyota	New Vios 1.5G M/T	1 Unit	Baik
4	Toyota	Kijang Innova G 2.0 M/T	1 Unit	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Pemeliharaan	Ket
1	Pengecatan Ruang Sidang, Selasar dan Lobi Belakang	-
2	Renovasi Toilet Pengunjung	-
3	Perbaikan Dak Atap Gedung	-
4	Pengecatan Pagar Depan	-
5	Pengecoran Jalan Masuk dan Keluar Gedung Kantor	-
6	Pengecatan Pos Jaga	-
7	Perbaikan Jaringan Internet dan Listrik Gedung	-
8	Renovasi Halaman Gedung Kantor	-

9	Pengecatan Tembok Halaman Tiang 4 Pilar	-
10	Pengecatan Kansteen	-
11	Pengecatan Garis Parkir dan Garis Arah Keluar Masuk Kendaraan	-
12	Perbaiki Kanopi Parkir Mobil dan Motor	-
13	Perbaiki Pintu Lobi Depan, Pintu Ruang Sidang & Pintu Ruang Kerja	-
14	Perbaiki Mesin Pompa Air & Jalur Air Gedung Kantor	-

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.10. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
1		N I H I L	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.11.Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan
1	Personal Computer	15	2012 – 2020
2	Laptop		2012 – 2019
3	Infocus	1	2015
4	PABX	1	2014
5	AC		2014
6	Faximile	1	2014
7	CCTV	24	2016
8	Sound system	1	2014
9	Mesin Absensi	2	2014

10	Tabung Pemadam Api Ringan	1	2018
11	Genset	1	2014
12	Handy Cam	1	2014
13	Monitor Informasi	7	2014 – 2019
14	Brankas	1	2012

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Jenis Pemeliharaan	Ket
1	Perbaikan Genset	-
2	Perbaikan PC Unit	-
3	Perbaikan PABX	-
4	Perbaikan CCTV	-
5	Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4	-
6	Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2	-
7	Perbaikan AC Split & Kaset	-
8	Perbaikan Printer	-
9	Perbaikan Meubelair	-
10	Perbaikan Infocus	-

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel. 4.13. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
		N I H I L	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court dukungan Teknologi Informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu yang hal tersebut selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

Sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan publik, sampai dengan tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima/melaksanakan pengadaan berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal computer, laptop, printer dan terus mengadakan pengkinian serta sinkronisasi data secara berkala dengan Mahkamah Agung RI.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi

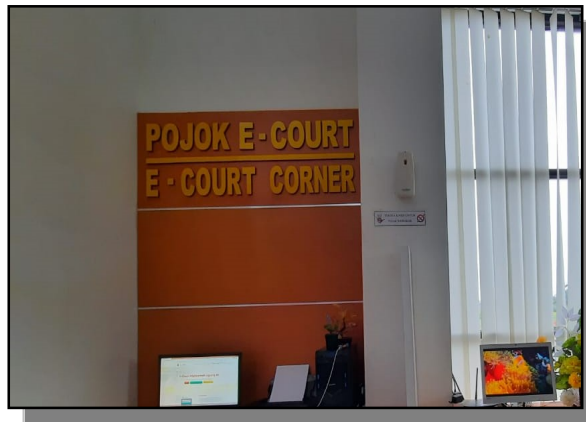
Satker	Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya								
	Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi
PTUN Serang	50 Mbps	3	3	27	12	12	1	2	10



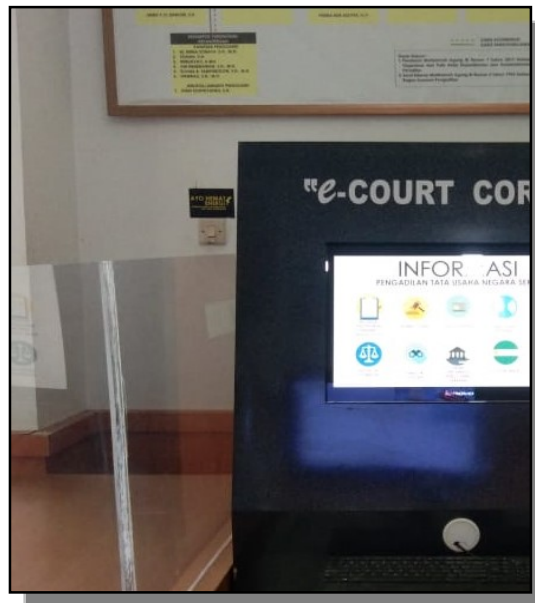
Gambar 4.1. Server PTUN Serang

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, secara garis besar proses e-Court dimulai pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar perkara elektronik (*e-payment*), pengiriman dokumen secara online, pemanggilan secara online (*e-summons*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan penyampaian putusan secara online.



Gambar 4.2 e-Court Corner



Gambar 4.3. Mesin informasi e-Court

Dalam implementasinya untuk tahun 2020 Perkara yang terdaftar melalui e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court

Tahun	Perkara Masuk	Putus	Sisa Perkara
2020	73	67	25

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan wujud integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara. Sampai dengan akhir tahun 2020 aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan SIPP Versi 4.0.1.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga informasi Perkara dapat diakses para pihak pencari keadilan cukup melalui SIPP baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang *diupload* ke SIPP secara otomatis juga *terupload* ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin database SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan sinkronisasi, baik ke tingkat banding maupun ke Mahkamah Agung RI. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Satker	Alamat SIPP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	http://192.168.51.2/SIPP32



Gambar 4.4. Menu Login SIPP PTUN Serang

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan peforma, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: 1142/DJMT.3/B/9/2017 tanggal 7 September 2020 tentang Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017.

Akreditasi penjaminan mutu yang berprinsip inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan maka di tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kembali melaksanakan akreditasi penjaminan mutu dan memperoleh hasil penilaian A (Excellent) hasil tersebut mengulangi/mempertahankan penilaian yang telah diperoleh sebelumnya pada tahun 2018, dengan kriteria penilaian yang digunakan meliputi 7 (tujuh) area yaitu: 1) Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia, 2) Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara,

3) Sarana dan Prasarana Pengadilan, 4) E-Judicary, 5) Layanan Pengadilan, 6) PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, 7) Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat.



Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.



Gambar 5.2. Meja PTSP PTUN Serang

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinatif, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap para pihak yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2020

No.	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan Layanan	Ket
1	Layanan Umum/Persuratan	- 1921 Surat Masuk - 1869 Surat Keluar	-
2	Layanan Hukum	- 18 Permohonan Informasi - 295 Pendaftaran Surat Kuasa	-
3	Layanan Perkara/Meja I	- 71 Gugatan - 2 Permohonan	-
4	Layanan Perkara/Meja III	- 38 Banding - 25 Kasasi - 5 Peninjauan Kembali - 2 Eksekusi	-
5	Layanan Perkara/Kasir	- 143 PNBP Biaya Perkara - 110 PNBP Salinan Putusan - 124 Pengembalian Sisa Panjar	-

C. Inovasi Pelayanan Publik

Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

1. Asisten Digital PTUN Serang, yang bernama "JAWARA", yaitu: aplikasi dengan menggunakan media whatsapp (WA) di nomor: **0813 1999 1211** yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan untuk memperoleh informasi tentang perkara di PTUN Serang, seperti: informasi jadwal sidang, informasi panjar biaya perkara, status perkara, informasi putusan, upaya hukum, ecourt

dan informasi lain terkait perkara di PTUN Serang, atau klik link/tautan berikut: bit.ly/AsistenDigitalPtunSerang;

2. Daftar Hadir Pihak dan Daftar Hadir Tamu dengan menggunakan *QR Code*, di mana para pihak yang akan bersidang dan tamu yang datang ke PTSP PTUN Serang bisa langsung scan *QR Code* di PTSP PTUN Serang dengan menggunakan handphone/HP pribadi untuk mengisi kehadiran tanpa bersentuhan dengan petugas PTSP PTUN Serang atau klik link/tautan berikut: bit.ly/DaftarHadirPtunSerang atau bit.ly/DaftarTamuPtunSerang;
3. Survey atau Kuisisioner PTUN Serang dengan menggunakan *QR Code*, di mana surveyor bisa langsung scan *QR Code* yang telah disediakan di PTUN Serang dengan menggunakan handphone/HP pribadi untuk menilai layanan yang ada di PTUN Serang atau dengan klik link/tautan berikut: bit.ly/SurveyPtunSerang;
4. Service Rating bagi Petugas PTSP PTUN Serang, yaitu layanan yang dapat dipergunakan bagi penerima layanan PTSP PTUN Serang untuk menilai kualitas layanan Petugas PTSP dan memberikan saran untuk perbaikan layanan PTSP PTUN Serang, dengan menggunakan barcode yang disediakan atau dengan klik link/tautan berikut: bit.ly/ServiceRatingPtunSerang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan beberapa program unggulan berupa:

1. *One Day Service*: Layanan Pendaftaran Perkara dalam 1 (satu) hari, yaitu 14 (empat belas) item layanan dari mulai pendaftaran gugatan sampai pengiriman panggilan ke para pihak;
2. *One Day Minutering*: Layanan percepatan minutasasi dan pemberkasan perkara dalam 1 (satu) hari, yang meliputi pembacaan putusan sampai minutasasi berkas perkara dan/atau pengambilan salinan putusan oleh para pihak dalam hari yang sama;
3. *One Day Court Service*: Layanan Pendaftaran Perkara dalam 1 (satu) hari, yaitu 14 (empat belas) item layanan dari mulai pendaftaran gugatan sampai pengiriman panggilan ke para pihak

4. *One Gate Service*: seluruh layanan yang diberikan di PTSP dan para pihak atau tamu tidak diperkenankan masuk ke ruangan pejabat atau pegawai;
5. *One Day Publish*: layanan putusan perkara dan upload putusan ke direktori putusan dalam hari yang sama saat putusan dibacakan.

D. Kegiatan Layanan Lainnya

1. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas praktek korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.



Gambar 5.4. Sertifikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

2. Penganugerahan Sebagai Badan Publik Menuju Informatif

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Di tengah kondisi menghadapi pandemi sebagai badan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan secara sungguh-sungguh UU KIP dalam penyelenggaraan *core business*nya dan dengan komitmen dan dukungan dari semua lini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil meraih kualifikasi menuju informatif tahun 2020 pada Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2020.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi menuju informatif pada tahun 2020 untuk kategori Lembaga Non

Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 5.5. Sertifikat Badan Publik Menuju Informatif

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
 - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
 - d. Surat Ketua MARI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
 - e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
 - f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 - g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : W2-TUN7/80/PS.00/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim senior sebagai koordinator Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
3. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian

Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan,

4. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian, Hakim dan Panitera Pengganti.
5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat oleh pejabat yang bersangkutan lebih diaktifkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2020

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1	HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H.,M.H. NIP. 19560619 198703 2 001	WAKIL KETUA	Koordinator Pengawas Bidang
2	H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H. NIP. 196910151992031014	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara (Administrasi Perkara & Persidangan)
3	YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H. NIP. 198610182009042004	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara (Administrasi Keuangan Perkara)
4	JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.M.H. NIP.19801225 200805 1 001	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
5	FEBRINA PERMADI, S.H. NIP. 198502182009122005	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
6	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum. NIP.197702172003122001	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
7	M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H. NIP. 198008112007041002	HAKIM	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan

B. Evaluasi

Dalam setiap lembaga pemerintah yang transparan maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih terdapat kekurangan.

Terhadap kinerja pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melayani para pencari keadilan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat-rapat yang dilaksanakan setiap bulan.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2. Percepatan penyelesaian perkara telah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis;
3. Pembinaan dan pengawasan internal telah ditunjuk dan di SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif;
4. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA satuan kerja dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga diharapkan prosentase realisasi setiap tahun meningkat;
5. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional;
6. Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam hal memberikan pelayanan prima dibuktikan dengan meraih Sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A “Excelent” dua kali berturut-turut;

7. Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atas pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019;
8. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan sehingga atas hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diganjar sebagai badan publik menuju informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain: Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan, Kendaraan Dinas, Meubelair serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
2. Perlu penataan area parkir tamu/pengunjung oleh karena jika pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten dirampungkan maka area parkir untuk tamu/pengunjung akan tergusur, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diperkirakan tidak memiliki area parkir untuk tamu/pengunjung.
3. Perlu penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain: pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.